

## Formulasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Regulasi Permendikbud 32 Tahun 2018 Di Kabupaten Lamongan

Bagus Budisetya Affandri

Magister Manajemen Universitas Islam Kediri Kediri

email: [b2affandri@gmail.com](mailto:b2affandri@gmail.com)

### *Abstract*

*Indonesia's quality human development starts with Early Childhood Education (PAUD). PAUD development has entered the stage of national quality standardization in 2015–2025. However, PAUD still faces problems with participation and equitable access. This study aims to describe (1) how to determine PAUD target candidates who are entitled to receive PAUD SPM assistance, (2) determine the proportion of budget allocations for fulfilling PAUD SPM which is the responsibility of local governments, and (3) procedures for compiling reports on the implementation and achievement of PAUD SPM.*

*The research data was collected through a qualitative approach. The key informants were the Head of the PAUD Division of the Lamongan Regency Education Office, the Head of the Family Social Protection and Security Section of the Lamongan Regency Social Service, and the Section Head of the Social Welfare and People's Welfare Section of the Lamongan Regency Bappeda. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The data collected were analyzed through comparative descriptive analysis techniques.*

*The results of the study indicate that (1) the determination of PAUD Target Students who are entitled to receive PAUD SPM Assistance requires data, including (a) a List of Names of PAUD Education Unit Students available at the District Education Office, (b) List of Names of Children aged 5-6 year the Poor Group available at the District Social Service. Determination of the proportion of the budget allocation for the fulfillment of the PAUD SPM which is the responsibility of the Regional Government. Determining the Proportion of Budget Locations for Fulfillment of SPM PAUD requires a collection of data, including (a). List of Prospective Students Recipient of PAUD SPM Assistance, (b) List of Profiles of all PAUD Unit Names, and (c) List of PAUD Educators and Education Personnel. Preparation of Reports on the Implementation and Achievement of PAUD MSS. In the preparation of reporting on the implementation and achievement of the PAUD SPM, it is the end result of a series of activities for the implementation of the PAUD SPM. From the results of mapping the needs for fulfilling the SPM PAUD, a strategy for fulfilling it is realized in a program of activities in the current fiscal year or the following fiscal year.*

*Lamongan Regency should continue to improve the quality of PAUD according to Permendikbud 32 of 2018. Education policy observers and educators of Human Resource Management courses in the field of education can refer to the results of this study for further development.*

*Keywords: Minimum Service Standard, Early childhood education.*

### **Latar Belakang Teoritis**

PAUD merupakan dasar yang dapat memberi pengaruh pada keberhasilan di jenjang pendidikan di atasnya. Usia dini merupakan usia keemasan (golden age) dalam perjalanan hidup manusia dan menjadi fase terpenting dalam tumbuh kembang seorang anak. Usia dini adalah saat yang amat berharga untuk menanamkan nilai-nilai spiritual, moral, dan norma sosial juga mengembangkan intelektual yang berguna untuk kehidupannya. Oleh karena itu, PAUD perlu dikembangkan dengan mendasarkan pada landasan keilmuan, landasan yuridis, sosial, budaya, dan

pedagogis. PAUD berperan membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya. Program pengembangannya perlu dirancang, direncanakan dan diterapkan dengan cermat oleh stakeholders sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak dalam regulasi yang kuat.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD tercantum dalam pasal 28. Selanjutnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diimplementasikan dalam arah pembangunan PAUD 2011 – 2045.

Secara garis besar, pelaksanaannya dibagi dalam 5 tahap, yakni: (1) tahap perluasan layanan dari tahun 2002 – 2011, (2) tahap pementapan mutu dari tahun 2011 – 2015, (3) tahap standardisasi mutu nasional dari tahun 2015 – 2025, (4) tahap standar mutu internasional tahun 2025 – 2035, dan (5) tahap layanan paripurna tahun 2035 - 2045.

Agenda Pendidikan 2030, antara lain menargetkan seluruh anak-anak mendapatkan akses PAUD atau pendidikan pra-SD, melalui program wajib PAUD satu tahun pra-SD. Target penyediaan pendidikan yang berkualitas ini juga sebagai poin keempat dari tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Agenda ini telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017. Perpres tersebut menegaskan bahwa Indonesia menjamin setiap anak perempuan dan laki-laki mendapat akses pengasuhan PAUD yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar.

PAUD di Indonesia memiliki karakteristik unik, yaitu: cakupan rentang usia 0 – 6 tahun, dan program layanannya terdiri atas: Taman Kanak-Kanak (usia 4-6 tahun), Kelompok Bermain (prioritas usia 2-4 tahun), Taman Penitipan Anak (prioritas usia 0-6 tahun), dan Satuan PAUD Sejenis (usia 0-6 tahun). Taman Kanak-Kanak termasuk pendidikan formal, sedangkan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis masuk dalam jalur pendidikan nonformal.

Semua program layanan PAUD bertujuan mengembangkan seluruh potensi anak yang meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni sehingga dapat mencapai kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut. PAUD, baik formal maupun nonformal sangat penting untuk diikuti seorang anak. Hal ini karena pada jenjang ini dapat menjadi pondasi pengembangan sumber daya manusia (SDM).

UNESCO menggambarkan posisi penerapan PAUD di Indonesia di antara negara-negara lain di dunia. Angka partisipasi PAUD di Indonesia berada pada urutan ke-45 dari 45 negara. Sementara itu kualitas PAUD di Indonesia menduduki peringkat ke 44 setingkat di atas India.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu lima tahun terakhir angka partisipasi kasar (APK) anak yang mengikuti PAUD di Indonesia, berfluktuasi dengan kisaran rata-rata di angka 36,17 persen. Masih jauh dari target RPJMN 2015-2019 sebesar 77 persen. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS 2019 menunjukkan angka partisipasi anak yang sedang mengikuti PAUD di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Dari kelompok umur terlihat partisipasi PAUD paling tinggi adalah pada kelompok usia 5-6 tahun yang termasuk dalam kategori TK (taman kanak-kanak), dengan selisih 6 persen antara perkotaan dan perdesaan. Hal ini menunjukkan, mayoritas anak mengikuti PAUD pada usia satu sampai dua tahun jelang masuk pendidikan dasar.

Hasil analisis korelasi menggunakan data BPS 2020 dengan metode Pearson menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD memiliki keterkaitan cukup kuat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, baik di wilayah Barat Indonesia maupun wilayah Timur. Angka statistik menunjukkan korelasi yang signifikan pada tingkat kesalahan 5 persen. Derajat korelasi bernilai 0,419 untuk Indonesia Barat dan 0,404 untuk Indonesia Timur menandakan hubungan cukup kuat dan positif antara APK PAUD dan IPM. Artinya, besaran kenaikan APK PAUD cenderung diikuti oleh kenaikan IPM.

Lebih terinci dari matriks korelasi analisis itu secara keseluruhan terlihat APK PAUD yang rendah mendominasi dan tersebar di kedua wilayah. Di Indonesia bagian Timur, 8 dari 13 provinsi (61,5 persen) memiliki APK PAUD rendah. Di wilayah Barat Indonesia, dari 21 provinsi 16 di antaranya (76,2 persen) termasuk kategori memiliki APK PAUD yang rendah. Ada lima provinsi yang APK jenjang PAUD-nya tinggi, yaitu DI Yogyakarta (tertinggi), DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh akses layanan PAUD yang masih terbatas. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, tercatat masih ada sekitar 30 persen atau 25.000 desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD.

Dari hasil pemetaan tersebut terlihat masih besarnya problem pemerataan pendidikan anak usia dini yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan yang akan dicapai dari capaian IPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental dan menjadi faktor penentu keberhasilan anak didik pada jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan kata lain, PAUD dapat menjadi kunci dari keberhasilan pembangunan SDM.

Dalam upaya memberikan batasan minimal kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan maka ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang telah ditetapkan melalui peraturan perundangan pemerintah.

SPM Pendidikan Dasar telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 100 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.

Data statistik Pemenuhan SPM PAUD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa APK PAUD di Provinsi Jawa Timur ada di kirsan 64.58% (Sumber : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2019/2020).

Di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya alam cukup besar, dan memiliki sumberdaya penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Kebijakan pengembangan potensi wilayahnya diharapkan sinergi dengan peningkatan mutu SDM. Sektor pendidikan di Kabupaten Lamongan hingga saat ini terus berbenah untuk memperbaiki kualitas, kuantitas maupun relevansinya.

Jika dilihat dari sisi kuantitas, jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Lamongan termasuk terbesar kedua setelah jumlah lembaga PAUD di Kota Surabaya se-Jawa Timur, yakni sebanyak 2.305 lembaga (Sumber Website Dapodik PAUD

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). APK PAUD Kabupaten Lamongan masih dibawah rerata APK PAUD Provinsi Jawa Timur dengan kisaran APK 58,19%, sedangkan APK PAUD Provinsi Jawa Timur adalah 64,59%. Akan tetapi, di Kabupaten Lamongan, ada ketimpangan antara Jumlah Lembaga PAUD yang besar dengan belum optimalnya Partisipasi Anak Usia 4-6 tahun yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini.

Persoalan krusial pendidikan di Lamongan hingga saat ini adalah masih terdapat kesenjangan mutu pelayanan pendidikan khususnya PAUD. Kesenjangan dalam pemenuhan SPM PAUD itu kemungkinan karena akibat perbedaan kapasitas SDM, kesadaran pemangku kepentingan, kemampuan penganggaran, sarana-prasarana dan faktor geografis/jarak.

Penelitian ini dimaksudkan untuk bisa membantu proses identifikasi, seleksi, dan pengembangan pendekatan alternatif agar sasaran dapat dicapai. Kegiatan ini merupakan sinergi dari harapan dan pandangan para pihak yang berkompeten dalam pendidikan, khususnya PAUD. Hasilnya dapat digunakan untuk membangun kerangka kerja (framework) bagi pengorganisasian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya untuk tujuan bersama. Kerangka kerja itu menjadi panduan penetapan, kebijakan dan alokasi pembiayaan yang paling efisien di bidang pendidikan, khususnya PAUD di Kabupaten Lamongan. Proses penyusunannya menggunakan prinsip-prinsip regulasi SPM Pendidikan khususnya PAUD, yaitu Sederhana, Kongkrit, Mudah diukur, Terbuka, Terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batasan pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

Pemilihan Kabupaten Lamongan sebagai lokasi studi kasus pada penelitian ini karena sedang melaksanakan program kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk beberapa Program Kementerian Nasional salah satunya adalah Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting. Pada program tersebut Cakupan Layanan Anak Usia 4-6 tahun bersekolah di PAUD sangat berperan dalam Penurunan Angka Stunting. Berdasarkan pengamatan penelitian pendahuluan diketahui bahwa di

Kabupaten Lamongan (1) belum terpetakan capaian SPM PAUD, (2) belum terpetakannya kesenjangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian SPM PAUD, (3) terbatasnya kemampuan komparatif daerah dalam rangka pencapaian SPM PAUD, dan (4) terbatasnya peran lintas sektor pada keterlibatan dalam rangka pencapaian SPM PAUD dalam pemanfaatan data yang dimiliki oleh lintas sektor. Hasil penelitian ini dapat menjadikan acuan kerja (model) untuk didesiminasikan ke daerah lain.

### Formulasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata formulasi adalah kata benda yang bermakna perumusan atau menyusun dalam bentuk yg tepat. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memaknakan sebagai perumusan kebijakan pendidikan dan implementasinya dalam upaya memenuhi suatu regulasi yang telah tersedia.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh

keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

### Pemenuhan

Pemenuhan berasal dari kata dasar penuh. Pemenuhan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemenuhan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pemenuhan dimaksud adalah pemenuhan atas sesuatu yang dibutuhkan (kebutuhan) dalam penentuan kebijakan publik untuk menerapkan dan memenuhi kebutuhan dasar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, organisasi melakukan kegiatan ekonomi baik bekerja, menjalankan bisnis, pengambilan kebijakan, dan lain-lain.

Di antara teori kebutuhan yang ada, teori kebutuhan Maslow merupakan salah satu teori yang paling populer. Banyak sekali akademisi atau penulis yang menggunakan teori kebutuhan Maslow saat berbicara mengenai kebutuhan.

Adalah Abraham Maslow, seorang pakar dalam psikologi, yang mencetuskan teori ini. Psikolog Amerika Serikat yang juga terkenal dengan teori psikologi aktualisasi diri ini menyusun hierarki (tingkatan) kebutuhan menjadi lima tingkat.

Maslow menyatakan, pemenuhan kebutuhan dapat dicapai dengan dua acara. Pertama, motivasi karena adanya kekurangan atau bisa disebut dengan deficiency motivation. Motivasi ini mendorong manusia untuk mengatasi masalah dengan menyadari adanya kondisi yang tidak ideal dan harus segera bangkit dari kondisi tersebut.

Kedua, motivasi karena adanya keinginan untuk berkembang atau bisa disebut dengan growth motivation. Motivasi ini mendorong seseorang untuk berkembang dan tumbuh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Agar dapat mencapai kesejahteraan, seseorang harus meningkatkan kapasitasnya.

### Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan manfaat pelayanan.

Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Pelayanan dasar di sini adalah pelayan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

a. Pengertian Standar

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP 102 tahun 2000).

b. Pengertian Pelayanan

Menurut Loina (2001) pelayanan ialah suatu proses keseluruhan sebuah pembentukan citra dari perusahaan, baik dengan melalui media berita, membentuk sebuah budaya perusahaan secara internal, ataupun melakukan sebuah komunikasi mengenai pandangan perusahaan pada para pemimpin pemerintahan serta publik yang lainnya yang berkepentingan

c. Prinsip-prinsip Standar Pelayanan Minimal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang menjadi prinsip-prinsip standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut ini.

- i. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
- ii. SPM ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

- iii. Penerapan SPM oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- iv. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diatur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batasan waktu pencapaian.
- v. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Di sisi lain penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik harus bisa dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan/pemimpin unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang sesuai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat prinsip pelayanan publik yaitu sebagai berikut.

- i. Kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- ii. Kejelasan
  - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
  - b. Unit kerja maupun pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- iii. Kepastian waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- iv. Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- v. Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status sosial.
- vi. Bertanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan

atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

- vii. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja: peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan secara teknologi telekomunikasi dan informatika.
- viii. Kemudahan akses: tempat dan lokasi sarana dan prasarana yang memadahi, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
- ix. Kedisiplinan, keramahan dan kesopanan: aparat penyelenggaraan pelayanan harus disiplin, sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan yang disertai rasa ikhlas.
- x. Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan masyarakat, selain itu untuk memberikan standar pelayanan publik bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas masyarakat, sebenarnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tugas pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang dimana didalam urusan wajib pemerintah terdapat adanya urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat yang terdiri dari :

- i. Pendidikan
- ii. Kesehatan
- iii. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- iv. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- v. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- vi. Sosial

Pelayanan publik yang mutlak memerlukan standardisasi pelayanan. Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Wiwien Dinar Pratisti (2008) memberikan batasan pengertian tentang anak usia dini yaitu anak usia nol tahun atau setelah lahir sampai usia 6 tahun. Sedangkan dalam Permendikbud Tahun 2014 No. 146 anak adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Sedangkan usia dini adalah masa ketika anak menghabiskan sebagian besar waktu untuk bermain.

Pada dasarnya anak usia dini memiliki karakteristik, menurut Aisyah (dalam Juita, 2012) karakteristik anak usia dini adalah:

- Memiliki rasa ingin tahu yang besar
- Memiliki pribadi yang unik
- Suka berfantasi dan berimajinasi
- Masa paling potensial untuk belajar
- Menunjukkan sifat egosentris
- Memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek
- Sebagai bagian dari makhluk sosial

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak usia 0 – 6 tahun yang tergolong makhluk sosial yang memiliki sifat dan pribadi yang unik.

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (Permendikbud 146, 2014)

Menurut Permendikbud 146 (2014) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Masa usia dini adalah masa emas (golden age) perkembangan anak di mana semua aspek perkembangan dapat dengan mudah distimulasi.

Dalam Permendikbud 146 (2014) pada masa emas ini sekitar 50% kapasitas

kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi 100% ketika berusia 8 sampai 18 tahun. Oleh karena itu anak membutuhkan stimulasi yang tepat, ajarkan pada anak hal-hal yang baik dan positif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan potensi tersebut adalah dengan program pendidikan yang terstruktur. Salah satu komponen untuk pendidikan yang terstruktur adalah kurikulum.

Pada Kurikulum 2013, pelaksanaan pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan karakteristik anak usia dini. Karena anak-anak memiliki karakteristik senang bermain, maka pada pembelajarannya digunakan prinsip bermain sambil belajar. Dengan bermain maka akan memudahkan anak dalam belajar berbagai hal. Bermain juga bermanfaat untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak.

#### **Permendikbud No. 32 tahun 2018**

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003) dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Program Wajib Belajar dicanangkan mengingat pentingnya pengentasan buta huruf di kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi menuntut seluruh masyarakat untuk mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Penduduk yang buta huruf niscaya akan menjadi beban penghambat kemajuan pembangunan manusia, sekaligus menjadi penghambat dalam memajukan negara atau daerah untuk keluar dari status negara terbelakang.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dituangkan dalam Regulasi Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa: (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan

dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. (2) Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. (3) Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Sebagai bentuk tindak lanjut Pemerintah dalam penerapan regulasi PP No. 2 tahun 2018, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Regulasi Permendikbud 32 tahun 2018.

#### **Fokus Penelitian**

Permendikbud No. 32 tahun 2018 tentang SPM Pendidikan, memuat SPM PAUD yang sudah di rilis secara resmi oleh pemerintah sejak diundangkan pada tahun 2018. Namun mengapa masih banyak daerah belum menerapkan aturan tersebut secara optimal? Salah satunya adalah Kabupaten Lamongan. Secara rinci fokus penelitian ini sebagai berikut.

- a. Bagaimana penentuan Calon Sasaran Pendidikan Anak Usia Dini yang berhak menerima Bantuan SPM PAUD?
- b. Bagaimana penentuan proporsi alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah?
- c. Bagaimana Pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan?

#### **Metode Penelitian**

##### **Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sesuai jadwal dari kampus. Adapun lokasi penelitian adalah pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lamongan.

#### **Rancangan Penelitian**

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan penelitian

deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan rancangan penelitian kualitatif dimana objek dari peristiwa tersebut ialah pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini dan dalam proses mengumpulkan data-datanya harus dengan wawancara atau observasi langsung ke informan serta peneliti tidak bisa memberikan dugaan sementara terkait peristiwa tersebut.

### Informan Kunci

Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penelitian kualitatif adalah pemilihan informan, karena informan merupakan seseorang yang dianggap mengetahui dengan baik mengenai permasalahan yang diteliti dan bersedia untuk memberi informasi kepada peneliti. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber adalah sangat penting. Informan adalah pusat peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data untuk menginformasikan permasalahan penelitian.

Moleong (2014:169) menjelaskan bahwa informan merupakan seseorang yang diharapkan bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian sehingga ia harus memiliki banyak pengetahuan mengenai latar penelitian. Berdasarkan uraian di atas maka pemilihan informan adalah yang utama sehingga dilakukan secara cermat, dikarenakan penelitian ini mengkaji tentang pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini di Kabupaten Lamongan maka peneliti memutuskan informan kunci sehubungan dengan penelitian adalah:

- a. Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- b. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
- c. Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kabupaten Lamongan.

### Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan maksud

tertentu terdiri dari pihak pewawancara dan terwawancara. Pihak pewawancara (interviewer) adalah seseorang yang memberikan pertanyaan dan pihak terwawancara (interviewee) adalah seseorang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. (Moleong, 2014:186).

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada bagian-bagian yang terlibat dalam aktivitas kontribusi kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (SPM PAUD) di Kabupaten Lamongan, baik dari sisi penyedia Sumber Data di beberapa OPD maupun dari sisi penentuan rumusan kebijakan yang terdapat di Kabupaten Lamongan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Dokumentasi

Menurut Moleong (2014:160) mengemukakan bahwa analisis dokumentasi dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi sifatnya alamiah sesuai dengan konteks lahiriyah tersebut.

Dokumentasi adalah salah satu sumber data yang penting dalam penelitian ini untuk mendukung keakuratan data dan proses penelitian. Selain itu, file dokumentasi akan menjadi bukti keabsahan telah dilakukannya sebuah penelitian. Dokumentasi dalam hal ini terdiri dari dokumen-dokumen, foto atau video yang didapatkan selama proses penelitian. Dokumentasi menjadi penting karena fakta dan data yang diperoleh sebagian besar tersimpan dalam bentuk dokumentasi, berupa gambar-gambar, tulisan atau bentuk dokumentasi lainnya. Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara membaca data atau catatan yang didokumentasikan mengenai kondisi populasi anak usia prasekolah SD dan profil satuan pendidikan PAUD di Kabupaten Lamongan.

### Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan kelanjutan dari pengolahan data. Analisis data yaitu berpikir tentang kaitan antara data dan mungkin dengan latar belakang yang menyebabkan adanya persamaan atau perbedaan yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Analisis bertujuan dalam membuat penyelesaian dan memberi jawaban-jawaban dari setiap rumusan masalah yang sudah dibuat, serta memberikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian ini mengaplikasikan metode analisis deskriptif, komparatif yang mana nantinya peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dan pendokumentasian selama proses penelitian sehingga bentuk analisis yang dilakukan merupakan penjelasan, bukan merupakan data statistik.

Miles dan Huberman (1992:15) dalam Moleong (2014) menyatakan dalam analisis kualitatif dapat dilaksanakan dengan cara terus menerus (interaktif) sampai tuntas sampai menjadi data jenuh. Teknik dalam melaksanakan analisis data, yaitu:

#### 1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Data didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi data-data atau catatan yang terdapat di lapangan yaitu deskriptif dan refleksi. Catatan deskriptif merupakan catatan alami, catatan mengenai sesuatu yang di dengar, disaksikan, dilihat dan yang peneliti alami tanpa ada asumsi atau tafsiran yang bersumber dari peneliti perihal suatu fenomena yang telah dialami. Catatan refleksi merupakan catatan yang isinya mengenai kesan, komentar, serta pendapat mengenai temuan yang ditemukan, dan perencanaan pengumpulan data pada tahap selanjutnya.

#### 2. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data dilakukan dengan mencari tema dan polanya, memilah hal-hal yang dirasa penting, merangkum, serta membuang hal-hal yang dirasa tidak diperlukan. Reduksi data nantinya akan menghasilkan gambaran dan langkah

yang jelas dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya.

Dalam penelitian ini nantinya akan dibuat ringkasan awal hasil dari observasi dan juga wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan yang sudah ditentukan serta akan memfilter beberapa temuan pada penelitian yang berlangsung di lapangan.

#### 3. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penyajian data bisa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan dari penyajian data ialah untuk menggabungkan informasi sehingga bisa menggambarkan keadaan yang terjadi. Peneliti tidak kesusahan dalam menguasai informasi baik dengan semua atau tugas-tugas tertentu dari hasil penelitian, untuk itu peneliti membuat suatu naratif, matrik atau grafik guna memudahkan dalam menguasai informasi data tersebut. Dengan demikian peneliti bisa memiliki penguasaan terhadap data serta tidak terpuruk pada kesimpulan dari informasi yang membosankan.

Data yang disajikan dalam penelitian ini ialah data dalam bentuk kata-kata dan table guna mempermudah peneliti dalam menyajikan data dan informasi terkait pemenuhan SPM PAUD di Kabupaten Lamongan.

#### 4. Conclusion Drawing or Verification (Menarik Kesimpulan atau Verifikasi)

Kesimpulan yang telah diungkapkan diawal hanya bersifat sementara dan akan kemungkinan berubah apabila ditemukan bukti-bukti lain. Tetapi apabila pada awal kesimpulan yang sudah diungkapkan dapat didukung dengan bukti yang valid atau sah dan konsisten, maka kesimpulan yang telah diungkapkan adalah kesimpulan yang andal atau kredibel.

### Istrumen Penelitian

- Daftar pertanyaan (Questionare) yang berisi sejumlah pertanyaan

tertutup tentang indikator operasional penelitian.

- Pedoman wawancara (Interview Guide) dipergunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan pengamatan langsung terhadap obyek studi.
- Pedoman dokumentasi (Documentation Guide) yang merupakan pedoman memuat garis besar/kategori untuk mencari data sekunder yang diperlukan.

### Tahapan Pemenuhan SPM PAUD

Standar Pelayanan Minimal (SPM) mempunyai peran penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. SPM menjadi dokumen yang memberikan acuan bagi daerah untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan. Selain itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga ditujukan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia.

Prinsip dalam menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal tersebut mengacu pada program pencapaian target di setiap tahunnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran daerah, baik APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Penerapan SPM PAUD meliputi 4 (empat) tahap, yaitu: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, rencana pemenuhan dan pelaksanaan pemenuhan. Dalam penerapan SPM PAUD bagi daerah, data merupakan kunci penting sebagai pijakan dalam menyusun strategi pencapaian indikator, menentukan tahapan aksi kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan. Mengacu kebutuhan penerapan SPM PAUD, data yang harus diperoleh, antara lain:

1. Data jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun
2. Data jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum terakomodasi di satuan PAUD;

3. Data jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun berasal dari keluarga tidak mampu (miskin)
4. Data pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
5. Data ketersediaan sarana dan prasarana termasuk kelengkapan dasar siswa PAUD.

Mengacu pada fokus sasaran SPM berupa akses layanan dan siswa miskin, maka data yang tersedia pada lembaga tersebut di atas bisa digunakan dalam pengumpulan data SPM PAUD. Mengingat bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi data warga berasal dari instansi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dan data warga miskin dari Dinas Sosial. Di dalamnya telah memuat informasi keluarga miskin, daftar anak yang dimiliki beserta usia dan jenjang pendidikan yang ditempuh. Data tersebut bisa diperoleh di instansi Bappeda, Bidang Sosial dan Budaya atau bidang lain sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) daerah yang berlaku. Sedangkan data kependudukan yang ada pada SISPENTAMA (Sistem Informasi Data Bersama) telah melalui proses verifikasi dan validasi masyarakat desa pada saat pengumpulan data. Oleh karenanya diperlukan koordinasi pengelola program PAUD dengan pihak terkait

### Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 : Pemenuhan SPM PAUD di Kabupaten Lamongan.

1.	Akreditasi satuan PAUD	68,33%
2.	Ketersediaan APE Dalam	87,46%
3.	Ketersediaan APE Luar	81,80%
4.	Ketersediaan Ruang Kegiatan	91,43%
5.	Rasio Rombel Guru	61,35%
6.	Ketersediaan Kepala Sekolah	97,04%
7.	Ketersediaan Kepala Sekolah S1/D4	87,66%
8.	Ketersediaan Kepala	26,72%

	Sekolah Bersertifikat Pendidik	
9.	Ketersediaan Kepala Sekolah telah Diklat Dasar Kepala Sekolah	26,68%
10.	Ketersediaan minimal 2 Tenaga Pendidik	9,72%
11.	Ketersediaan minimal 2 Tenaga Pendidik S1/D4	4,81%
12.	Ketersediaan minimal 2 Tenaga Pendidik Bersertifikat Pendidik	1,94%

Sumber : data primer diolah, 2022

Kabupaten Lamongan perlu melakukan upaya pembenahan dan strategi kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi minimal tujuh indikator di atas mencapai lebih dari 70%. Dari data tersebut pada Tabel 1 maka yang paling membutuhkan perhatian serius adalah sebaran guru bersertifikasi di satuan PAUD yang masih di bawah 10%. Namun, untuk peningkatan pencapaian yang lain juga perlu diupayakan sehingga maksimal pencapaian SPM di Kabupaten Lamongan.

Ketercapaian minimal SPM ini akan berdampak terhadap peningkatan kualitas. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SPM. Sudah ada beberapa Program Kegiatan yang telah dinalkukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, khususnya Bidang PAUD. Upaya tersebut sudah dilakukan dalam menangani persoalan yang ada terkait dengan SPM ini. Namun demikian, ke depan masih perlu langkah konkret lanjutan dalam memenuhi berbagai item yang dirasa masih kurang maksimal.

Analisa Pembiayaan ini dilakukan sebagai langkah lebih lanjut dari kebijakan yang telah ditentukan dalam analisa kebijakan. Sebagaimana menurut Munin Jaya (2004) yang termasuk dalam sumber dana dalam perencanaan daerah adalah APBD. Sehingga dalam perumusan analisa pembiayaan ini didasari juga pada kemampuan alokasi APBD dan APBN yang masih terkait dengan program pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini. Antara lain :

- a. Analisa Kebutuhan Pembiayaan
- b. Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

c. Standar Pengelolaan.

Tabel 2 : Rekapitulasi Biaya Pemenuhan SPM PAUD

Standar	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan Harga	Jumlah
Sarana	Pengadaan APE Luar Ruangan	412	20.000.000	8.240.000.000
	Pengadaan APE Dalam Ruangan	284	5.000.000	1.420.000.000
	Pembangunan Ruang Kegiatan	235	50.000.000	11.750.000.000
	Buku Gambar (6 buah per Calon Siswa per Semester)	31.056	10.000	310.560.000
	Alat Mewarna (1 set per Calon Siswa per Semester)	5.176	20.000	103.520.000
<b>Sub Total</b>				<b>21.824.080.000</b>
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD - Khusus Kepala Sekolah PAUD			
	Kepala Sekolah Belum Bersertifikat	1.592	150.000	238.800.000
	Kepala Sekolah Belum Diklat dasar KS	1593	150.000	238.950.000
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD - Khusus Tenaga Pendidik PAUD			
	Tenaga Pendidik Belum Bersertifikat	845	150.000	126.750.000
<b>Sub Total</b>				<b>604.500.000</b>
Pengelolaan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	Pelatihan Supervisi Kepala Sekolah PAUD	2.264	100.000	226.400.000
	Pelatihan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah pada satuan PAUD – Penataan Rasio Siswa Rombel	875	100.000	87.500.000
	Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	1.547	100.000	154.700.000
	<b>Sub Total</b>			
<b>Total Pembiayaan</b>				<b>22.897.180.000</b>

Sehingga dari Rekapitulasi Biaya yang dibutuhkan dalam Pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lamongan diproyeksikan untuk dapat dipenuhi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dilakukan upaya pembiayaan tersinergi antara APBD dan APBN. Adapun rekapitulasi pembiayaan pemenuhan SPM selama 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Pemenuhan SPM PAUD

Standar	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Jumlah
<b>Sarana</b>	12.114	8.170	1.540	21.824
<b>Prasarana</b>				
<b>Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	605	0	0	605
<b>Pengelolaan</b>	188	200	81	469
<b>Jumlah</b>	<b>12.906</b>	<b>8.370</b>	<b>1.621</b>	<b>22.897</b>

Catatan : Nilai dalam juta rupiah

**Kesimpulan**

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini dibutuhkan data sebagai persiapan analisis yang dimiliki oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah, meliputi: Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Jika seluruh data sudah tersedia maka bisa diperoleh, antara lain:

1. Calon Siswa Sasaran Pendidikan Anak Usia Dini yang berhak menerima Bantuan SPM PAUD, dengan tahapan :
  - Pemetaan/Pemilahan dari daftar Nama Siswa yang menempuh/bersekolah pada setiap Satuan Pendidikan PAUD serta tergolong Kelompok Miskin dari Data Daftar Siswa satuan Pendidikan PAUD (Dinas Pendidikan);
  - Petakan/Pilah Kelompok Anak Usia 5-6 tahun dari Daftar Nama Kelompok Miskin dari Data Daftar Nama Penerima bantuan Sosial (Data DTKS-Dinas Sosial);
  - Pemadanan Data antara Daftar Nama Siswa Kelompok Miskin dari Data Siswa Dapodik dengan disandingkan Daftar Anak Usia 5-6 Tahun Kelompok Miskin Penerima bantuan Sosial, diharapkan tidak ada Daftar Anak Usia 5-6 Tahun Kelompok Miskin yang akan ganda/tertulis lebih dari sekali untuk menjadi Sasaran Penerima SPM PAUD;
  - Hasil akhir pemadanan data tersebut adalah **Daftar Calon Siswa Penerima Bantuan SPM PAUD**.
2. Proporsi alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dengan tahapan:
  - Dari Daftar Calon Siswa Penerima Bantuan SPM PAUD, dapat dilakukan perhitungan kebutuhan perlengkapan pribadi calon penerima bantuan SPM PAUD (6 Buku Gambar dalam Kondisi Baru dan 1 set Alat Mewarna untuk setiap Calon Penerima SPM PAUD)
3. Pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, tersebut harus termuat beberapa tahapan yang membahas, antara lain:
  - Dari Daftar Profil seluruh Nama Satuan Pendidikan PAUD, dapat dilakukan perhitungan kebutuhan ruang kegiatan belajar mengajar, Alat Pratek Edukasi (APE Luar dan APE Dalam), satuan pendidikan PAUD yang belum terakreditasi bagi seluruh satuan pendidikan PAUD yang terpilih berdasarkan Bentuk serta Status Satuan pendidikan PAUD yang tersedia.
  - Dari Daftar Nama Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD, dapat dilakukan perhitungan kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kualifikasi pendidikan terakhir, status sertifikasi dan diklat kepala sekolah sesuai dengan standar yang diharapkan dan disandingkan untuk sesuai dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia.
  - Dari perhitungan kebutuhan yang terpilih berdasarkan 3 komponen, maka sandingkan data kebutuhan tersebut dengan nilai satuan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi setiap komponen kebutuhan hasil perhitungan yang diperoleh.
  - Dari nilai total anggaran tersebut, bisa diperoleh besaran proporsi anggaran yang diharapkan bisa disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan pemenuhan SPM PAUD Kabupaten/Kota.
  - Pengumpulan data;
  - Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;

- Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan
- Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

#### Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiman, Arif. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Prenada Media Group.
- Dimiyati, M. 2000. Demokratisasi Belajar pada Lembaga Pendidikan dalam Masyarakat Indonesia Transisional: Suatu Analisis Epistemologi Keindonesiaa. Malang: CV. Wineka Media.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. 2015. Modul K-1 Sosialisasi SPM DIKDAS Kepada Pemangku Kepentingan di Tingkat Kabupaten/Kota. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dunn, W. N. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan Samodra Wibawa, dkk) (2nd ed.). Yogyakarta: UGM Press.
- Dye, Thomas R. 2011. Understanding Public Policy. Singapore: Longman.
- Fikri, Zakiyudin. 2015 “Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015”. Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 3rd, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Freire, P. 1985. Pendidikan Kaum Tertindas, Jakarta: LP3S
- Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho. 2008. Kebijakan Pendidikan. Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- bekerja sama dengan Penerbit Widya Karya.
- Hardani dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haris, Syamsudin. 2005. Desentralisasi & Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI press.
- Harmiyanto. 2009. “Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah (Studi Deskriptif SMA Negeri 4 Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo)”. Tesis, Program Magister Administrasi Publik. Surabaya: Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- Hidayat, Tazqy, 2015. “Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah di SMP Negeri 3 Tarakan”. Skripsi. Program Studi Kebijakan Pendidikan, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. Kebijakan Publik (berbasis Dynamic Policy analisis). Yogyakarta: Gafa Media.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. Kebijakan Pembaruan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press.
- Jauji, Ibnu dkk. 2020. “Evaluasi Kebijakan 5 Hari Kerja Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan Kota Mataram”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan.
- John W. Creswell. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, A. Busyro. 2015. “Kata Pengantar” dalam Ijtihad Kebijakan. Surabaya: Muara Progresif.
- Kartono, Kartini. 1997. Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

- Kemdikbud. 2015. Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Jakarta: Kemdikbud.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. Modul Pelatihan Analisis Kebijakan. Jakarta: LAN.
- Lexy J. Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mansyur, Achmad. 2010. Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1986). *Effective policy implementation*. Lexington: D.C, Heath.
- Miles, Matthew B. and Huberman, Michael A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Mulyadi, Deddy. 2010. *Membidik Jalan Menuju Public Trust: Isu-isu Aktual Administrasi Publik dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: STIA LAN Bandung Press.
- Nawawi, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oetama, Jakob. 2001. *Berpikir Ulang tentang Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2015 (Perubahan PP. No. 19 Tahun 2005) Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 57 Tahun 2021 (Pengganti PP No. 13 Tahun 2015) Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Prasetya, Teguh dkk. 2018. "Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM-Dikdas) Tingkat SMP (Studi pada SMPN 6 Satu Atap Rembang Dan SMPN 3 Purbalingga)" oleh. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005, *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabdaningtyas, Lilik. 2018. "Model Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Satuan Pendidikan Jenjang SD". *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. FKIP Universitas Lampung.
- Saleh. 2017. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal pada Sekolah Dasar di Daerah Perbatasan Kecamatan Sebatik Tengah". Tesis, Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.
- Sanafiah, Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: IKIP Malang.
- Sanusi, Anwar. 2009. *Analisis Kebijakan Publik (Neo-Institusionalisme, Teori dan Praktek)*. Depok.
- Setiawati, Esti. 2018. "Studi Evaluatif Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul" dalam *Jurnal Trihayu: Jurnal Pendidikan ke-SD-an*, Vol. 4, Nomor 2, Januari 2018.
- Siswoyo, Dwi. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Solahuddin, Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soenarko. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Menganalisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suaeb, Eka. 1998. *Proses Kebijaksanaan Publik di Indonesia*. Manajemen Pembangunan. Bandung: PKP2A I LAN.
- Sudjana, D. (2006). *Evaluasi program pendidikan luar sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukristyanto, Agus dan Bagong Suyanto. 2021. *Pembangunan dan Birokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Suprptomoto, Bambang. 2009. Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129<sup>a</sup>/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Ngrambe Kabupaten Ngawi). Tesis. Program Magister Administrasi Publik. Surabaya: Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- Suprobo, Stephanus Hari. 2012. "Evaluasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penciptaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)". Tesis. Program Magister Sains dan Doktor, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Suyanto. 2001. Formula Pendidikan Nasional Era Global. Makalah. Disajikan dalam Simposium Pendidikan Nasional dan Munas I Alumni PPS.UM. di Malang, 13 Oktober 2001.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, HAR. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . 2017. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, S., Prabuningrat, Y. dan Pramusinto, A. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Media Nusa Creative.
- Wijanarti, Novita. 2016. "Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Prinsip Good Governance di Sekolah Dasar Negeri". *Jurnal Manajemen Pendidikan, FKIP Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Wijanarti, Novita dan Slameto. 2016. "Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Prinsip Good Governance di SD Negeri 4 Kaliaman Jepara". *Prosiding Seminar Nasional, Prodi Pendidikan Guru SD dan Prodi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- Winaryo, Slamet. 2020. "Evaluasi Program Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas dan Terakses Jenjang Pendidikan Dasar di Provinsi Kalimantan Tengah". *Equity and Aducaation Journal (EEJ)*.
- Wollman, Helmut dalam Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney (edtr), 2007., *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods.*, 2007., New York: CRC Press., Taylor & Francis Group.
- Yeremias, T. Keban. 2019. *Enam dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, teori dan Isu)*. Yogyakarta: Gafa Media.